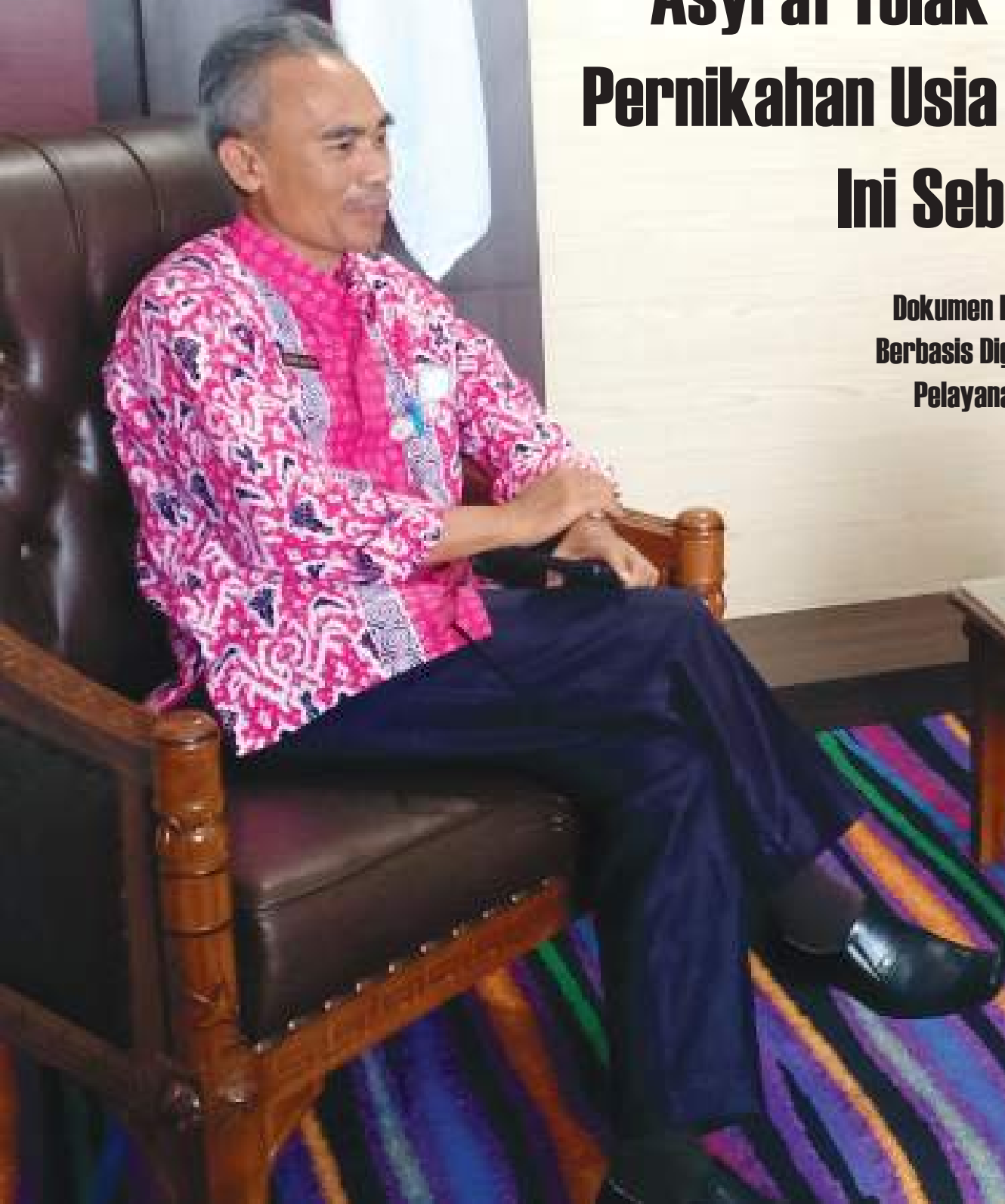


Edisi 1/Juli/Tahun 2023

JURNAL

Asyraf Tolak Keras Pernikahan Usia Anak, Ini Sebabnya

**Dokumen Kependudukan
Berbasis Digital Membuat
Pelayanan Lebih Cepat**



Tajuk Rencana

DRPPA Membutuhkan Komitmen

Semua desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), terutama di Belitung. Namun butuh komitmen kepala desa dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Para kades dan jajarannya membentuk desa ramah perempuan dan anak dengan membuat Perdes bersama BPD setempat. Sebelumnya, pembentukan DRPPA percontohan sudah lakukan di Desa kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan. Selanjutnya dilakukan pembinaan dengan merekrut relawan satgas PPA.

Mengenai indikator DRPPA antaranya, adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa. Mesti tersedia juga data desa yang membuat data pilah tentang perempuan dan anak.

Selain itu, harus ada juga peraturan desa tentang DPRRA. Di desa juga disarankan agar membuat peraturan desa terkait perkawinan usia anak dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian melakukan pendataan anak-anak yang putus sekolah.

Ada baiknya melibatkan anak dalam membuat keputusan tersebut. Dalam indikator tersebut perlu juga pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset untuk mewujudkan DRPPA.

Tak hanya itu, perempuan juga harus dilibatkan untuk sektor kewirausahaan. Tujuannya untuk mengangkat derajat perempuan dan anak di desa setempat.

Mesti menjadi perhatian juga, mengenai persentase keterwakilan perempuan di Pemdes, BPD, LMD dan lembaga ada desa.



DITERBITKAN

SEKRETARIAT/HUMAS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCARA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ALAMAT

Jalan Pulau Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149

Asyraf Tolak Keras Pernikahan Usia Anak, Ini Sebabnya

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak keras pernikahan usia anak. Peralnya banyak dampak buruk akibat pernikahan usia anak tersebut. Selain itu, pernikahan usia anak pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pernikahan usia anak di Indonesia termasuk tertinggi kedua di Asean setelah Kamboja. Asyraf menambahkan, diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Anak perempuan menjadi korban paling rentan dari kasus pernikahan usai anak.

"Prelevansinya, anak perempuan di pedesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan," kata Asyraf saat Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Zero Pernikahan Usia Anak, di Auditorium Zahari M. Zein, Kabupaten Beltim, Rabu (24/5/2023).

Pengantin anak paling mungkin berasal dari keluarga miskin. Asyraf menambahkan, begitu juga dengan perempuan kurang berpendidikan dan drop out dari sekolah, umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada anak bersekolah. Pendidik sangat penting untuk menekan angka pernikahan usai anak tersebut.

Pernikahan usia anak diatur Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahn 2002 dan Kepres No 36 Tahun 1990 tantang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Mengenai ratifikasi disebutkan, jelas Asyraf, segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tak hanya itu, perkawinan usai anak juga menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Asyraf mengatakan, kasus ini menyebabkan tidak terpenuhi hak dasar anak seperti, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga hak sipil anak,



hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Pemerintah memberikan mandat pencegahan perkawinan usia anak melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ia menambahkan,

jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pasangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti pendukung.

"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan, wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang melangsungkan perkawinan," jelasnya.

Sebelumnya Bupati Belitung Timur Burhanudin juga mengajak agar masyarakat melakukan pencegahan pernikahan usia anak. Jika tidak dilakukan, bukan hanya masalah pernikahan yang

muncul. Sebab akan muncul juga permasalahan setelah anak tersebut menikah.

"Tidak lagi tabu untuk membicarakan dan men-sosialisasikan mengenai pernikahan usia anak ini. Jika anak perempuan sudah menstruasi dan anak laki-laki sudah mimpi basah, maka berikan penjelasannya," saran Burhanudin.

Kegiatan ini dihadiri Forkopinda, para Kadis OPD, para Camat, dan para Kades se-Kabupaten Belitung Timur. Menutup kegiatan dilakukan penandatanganan komitmen bersama Zero Pernikahan Usia Anak.

55

55

56

Perdes Jadi Strategi Mencegah Pernikahan Usia Anak

Peraturan desa (perdes) menjadi strategi upaya pencegahan pernikahan usia anak. Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan salah satu desa yang telah membuat peraturan desa terkait pernikahan usai anak tersebut.

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, adanya perdes tersebut membuat aparat Desa Payung tidak memfasilitasi kegiatan perkawinan usia anak. Selanjutnya aparat desa tidak menghadiri pesta perkawinan itu.

"Peran relawan SAPA mencegah terjadinya pernikahan usai anak. Diharapkan ada penurunan jumlah kasus perkawinan anak," kata Asyraf saat Fasilitas Kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), di Gedung GOW, Kabupaten Bangka, Selasa (20/6/2023).

Desa Air Anyir dan Desa Penyamun ditetapkan sebagai model desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Bangka. Selanjutnya, kata Asyraf, ada pengembangan sembilan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Bangka.

Sejumlah desa tersebut di antaranya, Desa Rebo, Desa Air Ruai, Desa Bakam, Desa Pagarawan, Desa Petaling, Desa Puding Besar, Desa Riau, Kelurahan Parit Padang dan Kelurahan Kuto Panji.

Relawan SAPA melakukan pengorganisasian sosial didasarkan pada jaringan, norma atau kepercayaan. Asyraf menambahkan, relawan SAPA juga berperan untuk mewujudkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Asyraf, relawan SAPA bergerak di desa dan kelurahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, menyusun pendataan usai kawin di bawah umur. Selain itu, melakukan sosialisasi dan edukasi di desa, membantu penanganan masalah perkawinan anak dan mencatat kasus-kasus.

Relawan SAPA dapat membangun pengintegrasian tempat pelaporan adanya kasus perkawinan usai anak. Lebih jauh Asyraf mengatakan, harus ada upaya membangun gerakan desa 'Nikahkan anak minimal umur 19 tahun'.

"Semua pihak terlibat mewujudkan DRPPA. Seperti dunia usaha, tenaga pendidikan, kesehatan, forum anak, pemerintah di semua level, relawan, LSM, tokoh agama masyarakat, perempuan dan organisasi perempuan hingga media massa," jelasnya.

Sebelumnya acara ini dibuka Nurita, S.Sos Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka. Ia berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kabupaten Bangka terus berlanjut.

"Kita berharap dukung menjadikan desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini terus berlanjut," ungkap Nurita.



Dokumen Kependudukan Berbasis Digital, Asyraf: Digitalisasi Membuat Pelayanan Lebih Cepat

Tahun 1995 lalu, dokumen kependudukan masih dibuat secara manual. Seiring kemajuan teknologi, sejak tahun 2019 dokumen kependudukan mulai beralih dari sistem manual ke elektronik. Tanda tangan di sejumlah dokumen kependudukan sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Hal tersebut disampaikan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat menyampaikan materi terkait Keabsahan Tanda Tangan Elektronik saat Kegiatan Diseminasi Layanan Aposittle, Fox Harris, Rabu (21/6/2023).

Kegiatan yang dimotori Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung kali ini mengusung tema “Wujudkan Layanan Satu Pintu Satu Langkah untuk Seluruh Dunia”.

Menurut Asyraf, penggunaan tanda tangan elektronik membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat. Pasalnya penandatanganan dokumen bisa dilakukan dimana saja, artinya tidak harus berada di kantor. Hal ini sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal.

“Tanda tangan elektronik dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang ditandatangani,” kata Asyraf.

Saat ini, kata Asyraf, penandatanganan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akta kawin dan akta cerai sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik tersebut tentunya harus tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi, menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui Kementerian Kominfo.

Untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi, jelas Asyraf, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum

keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana

na diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Saat menyinggung mengenai pembuatan dokumen kependudukan, Asyraf mengharapkan masyarakat menyampaikan data kependudukan ke Disdukcapil secara lengkap dan benar. Contohnya mengenai kondisi anggota keluarga penyandang disabilitas.

“Data kependudukan yang benar dan akurat untuk menentukan kebijakan. Seperti membangun infrastruktur daerah, kebijakan pembangunan jalur kuning di trotoar yang diperuntukkan bagi tuna netra,” jelasnya.



Okta Safira Terpilih sebagai Ketua FA BISA



Okta Safira terpilih sebagai Ketua Forum Anak (FA) BISA Bangka Belitung Serumpun Sebalai. Putri asal Kabupaten Belitung ini akan memimpin Forum Anak BISA selama periode 2023-2025.

Sementara menduduki posisi Wakil Ketua Forum Anak BISA yakni, Dafa asal Kabupaten Bangka. Untuk jabatan sekretaris dan bendahara masing-masing dijabat Viana Putri Pratiwi dan Suci.

Sebagaimana diketahui, pemilihan kepengurusan FA BISA tersebut dilakukan saat kegiatan pertemuan Forum Anak BISA Bangka Belitung Serumpun Sebalai, di Parai Hotel & Resorts, Kabupaten Bangka.

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan kepengurusan FA BISA periode 2023-2025 dapat membuat anak-anak Bangka Belitung menjadi yang terdepan.

"Saya ucapkan terima kasih atas kepengurusan FA BISA sebelumnya. Saya berharap kepengurusan selanjutnya dapat membuat anak-anak Bangka Belitung menjadi yang terdepan," kata Asyraf saat menutup kegiatan, Jumat (16/6/2023).

Inti dari keberadaan forum anak, jelas Asyraf, hendaknya dapat menyampaikan hak partisipasi dengan menghasilkan suara anak. Sebagaimana diatur dalam konvensi hak-hak anak dikelompokkan men-

jadi empat kategori.

Pertama, kata Asyraf, hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Lalu ketiga lanjut Asyraf, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

"Terakhir keempat, hak berpar-

tisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak," ungkapnya.

Lebih jauh Asyraf mengharapkan, generasi anak-anak harus lebih baik dari generasi sekarang, sebagai pelopor dan pelapor. Untuk itu, penting bagi anak-anak agar terus menuntut ilmu.

"Diharapkan forum anak ini agar dibentuk mulai dari tingkat kelurahan atau desa. Sebab forum anak menjadi wadah formal untuk menyalurkan aspirasi anak-anak," pesan Asyraf.



Partisipasi Politik Perempuan Masih Rendah



Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Bangka Tengah masih rendah. Sekarang ini hanya ada empat perempuan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Peningkatan kapasitas ini hendaknya dapat membuat perempuan mampu bersaing dengan laki-laki.

Demikian disampaikan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Kabupaten Bangka Tengah, di Hotel Soll Marina, Jumat (16/6/2023).

"Agar keterwakilan perempuan meningkat di legislatif, hendaknya perempuan memilih calon legislatif perempuan. Namun saat ini masih kurang calon perempuan berkualitas serta kurangnya dukungan pembiayaan politik bagi perempuan. Kendati demikian perempuan harus punya modal sosial," kata Asyraf.

Kegiatan yang digelar DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah kali

ini diikuti sejumlah calon anggota legislatif perempuan dan pengurus organisasi perempuan di Kabupaten Bangka Tengah. Tampak hadir saat kegiatan, dr. Dede Lina, M.KM Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah.

Menyinggung mengenai peningkatan kapasitas perempuan, Asyraf mengatakan, tahun ini program sekolah perempuan di DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan bersifat tematik. Artinya, program kurikulum yang ditawarkan menyesuaikan dan memperhatikan potensi daerah.

Asyraf mencontohkan tema pengembangan sektor industri rumahan. Program sekolah perempuan bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan di Bangka

Belitung. Sebab menurut data dilansir BPS tahun 2022, rata-rata lama sekolah perempuan di Bangka Belitung masih di bawah angka rata-rata nasional.

"Rata-rata lama sekolah perempuan Indonesia berada di angka 8,87, sementara di Bangka Belitung berada di angka 7,87. Sekolah perempuan ini menjadi salah satu langkah mengatasi persoalan tersebut," ungkapnya.

Yanti salah satu peserta menanyakan cara mengantisipasi pergaulan bebas, pasalnya pergaulan anak-anak sekarang ini berbeda dengan pergaulan anak di zaman dulu. Hal ini berdampak terhadap terjadinya pernikahan usai anak.

Menjawab pertanyaan tersebut, Asyraf menyarankan agar orang tua mampu mendidik anak sampai keperguruan tinggi atau universitas. Sebab di daerah dengan tingkat pendidikan tinggi, berdampak rendahnya angka pernikahan usai anak.

"Untuk tempat bermain, jangan sampai larut malam atau dibatasi sampai pukul 21.00 saja. Jika anak yang keluar malam harus didampingi orang tua. Selain itu, orang tua membekali anak dengan pendidikan agama," sarannya.



Jaga Keluarga Terutama Anak Agar Menjadi Orang Baik

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap ibu-ibu bisa menjaga keluarga dan anak agar bisa menjadi orang baik. Sebab perempuan sebagai penjaga peradaban. Menjaga hubungan baik dengan sesama dimulai sejak dini.

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap ibu-ibu bisa menjaga keluarga dan anak agar bisa menjadi orang baik. Sebab perempuan sebagai penjaga peradaban. Menjaga hubungan baik dengan sesama dimulai sejak dini.

"Saya sering berinteraksi dengan sesama selain beragama Islam. Selama berada di Yogyakarta, saya punya orang tua angkat beragama kristen," kata Asyraf saat Kegiatan Pembinaan Keluarga Kristiani, di Ruang Pertemuan Romo-dong, Bangka City Hotel, Kamis (22/6/2023).

Pada kegiatan yang digelar Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Asyraf menyampaikan materi bertajuk Menuju Keluarga Sejahtera melalui Ketahanan Keluarga.

"Orang tua angkat saya tersebut memberikan perhatian kepada saya seperti anaknya sendiri. Ketika saya ingin salat, maka disediakan sejadah dan tempat salatnya. Sejak dulu saya mempunyai hubungan baik dengan keluarga tersebut," lanjutnya.

Lebih jauh Asyraf mengatakan, DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sering melibatkan organisasi keagamaan untuk mendiskusikan banyak hal terkait

perempuan dan anak. Sebab perempuan dan anak dalam keluarga menjadi perhatian pemerintah.

Menyinggung mengenai pendidikan, Asyraf berpesan agar ibu-ibu memperhatikan pendidikan anak-anak. Sekolahkan anak-anak hingga ke perguruan tinggi. Perhatian seorang ibu akan berdampak baik bagi anak, sehingga tidak ada anak-anak

yang putus sekolah.

Perempuan punya tingkat peradaban tinggi. Asyraf menambahkan, hobi positif yang dimiliki ibu-ibu bisa meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Contohnya, hobi menanam tanaman hias. Jika tanaman hias sudah banyak, bisa saja dijual secara online. "Ibu-ibu harus mempunyai kemampuan berdagang secara online. Ini bisa meningkatkan pendapatan perempuan. Selain itu, untuk mengimbangi kemampuan ibu-ibu berbelanja online," saran Asyraf.

Selama ini DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pembinaan terhadap industri rumahan. Asyraf menjelaskan, industri rumahan tersebut bisa dimulai dari



melakukan hobi. Diharapkan hobi yang menghasilkan produk bermanfaat bagi keluarga.

"Jika ibu-ibu mempunyai hobi menanam anggrek lanjutkan aktivitas tersebut. Harga anggrek tersebut jika dijual hingga jutaan rupiah. Fotokan produk dari hobi ibu-ibu, kemudian dijual secara online," ungkap Asyraf.

Memasuki sesi tanya jawab, Astri salah satu peserta menanyakan mengenai pola pikir seolah-olah masalah keluarga menjadi tanggung jawab perempuan. Sementara kewajiban laki-laki hanya bekerja di luar rumah.

Menjawab hal tersebut, Asyraf mengatakan, pengambilan keputusan dalam keluarga harus diam-

bil secara bersama-sama. Contohnya masalah pendidikan anak, ini harus menjadi perhatian kedua orangtua. Ada baiknya semua persoalan didiskusikan dengan baik.

"Kita sering mendapatkan laporan kasus-kasus persoalan di dalam keluarga. Dalam hal ini kita akan memberikan ruang untuk mediasi," jelasnya.

8 Mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik PPL di DP3ACSKB

Sebanyak 8 mahasiswa IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung melaksanakan Praktik Profesi Lapangan (PPL) di DP3ACSKB dan PUSPAGA Provinsi Bangka Belitung. Dijadwalkan kegiatan akan berlangsung selama 45 hari.

Kegiatan tersebut dimulai tanggal 20 Juni hingga 30 Juli 2023. Mahasiswa PPL berasal dari berbagai program studi, di antaranya Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Psikologi Islam (PI), dan Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan, mahasiswa yang melakukan PPL sudah menjadi bagian dari kantor ini. Sehingga ketika ada masalah jangan diam, namun dikomunikasikan dengan baik. Persoalan-persoalan rahasia dalam penanganan kasus, hendaknya tetap dirahasiakan.

"Seperti mahasiswa psikologi yang menangani kasus, maka harus bisa menjaga kerahasiaan korban. Selain itu harus bisa mengikuti aturan yang ada di kantor ini," pesan Asyraf saat memberi pengarahan di ruang

kerjanya, Selasa (20/6/2023).

Kegiatan PPL bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis selama kuliah. Harapannya, kegiatan ini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Sebelumnya, H. Musa, M.Kom.I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengatakan, melalui kegiatan ini mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis yang berharga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi mereka di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari," kata Musa.

Kegiatan PPL ini bagian komitmen IAIN SAS Bangka Belitung dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Ia menambahkan, tidak hanya berkualitas akademik, tetapi mahasiswa juga memiliki keterampilan praktis dan kepedulian sosial tinggi.

"Kita harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di masa depan untuk memberikan manfaat yang lebih baik," ungkapnya.



Asyraf: Turunkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Anak



Terak - Peringatan Harganas bentuk nyata komitmen pemerintah yang konsisten membangun sumber daya manusia. Kali ini, kegiatan diisi Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor (PSA), di lapangan sepakbola SDN 7 Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah.

Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan, kegiatan ini dapat mencegah sekaligus menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. Selanjutnya dapat meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan konseling, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

"Kegiatan ini menjadi momentum tepat untuk melaksanakan pelayanan KB secara serentak," kata Asyraf saat membacakan sambutan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat Peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (14/6/2023).

Lebih jauh ia mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pencapaian target pelayanan KB di

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab dalam penanganan stunting, keluarga merupakan komponen utama berperan mencegah maupun penanggulangannya.

"Mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu melakukan berbagai hal, salah di antaranya mendukung program Bangga Kencana," kata Asyraf.

Sebelumnya, sempat mengikuti Teleconference Pelayanan KB Sejuta Akseptor secara serentak se-Indonesia. Sebagaimana diketahui kegiatan peringatan Harganas kali ini mengusung tema, 'Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju'.

Hal senada dikatakan Inspektur Utama (Irtama) BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono. Ia mengatakan, pencegahan stunting harus di mulai dari keluarga. Penanggulangannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas, maka dilaksanakan program KB untuk mengatur kehamilan.

"Ini guna menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu,

bayi dan anak serta meningkatkan akses. Selain itu, meningkatkan kualitas informasi pendidikan konseling dan pelayanan keluarga berencana," jelasnya.

Sementara Algafry Rahman, ST Bupati Bangka Tengah mengatakan, target kegiatan ini kurang lebih 892 PSA dengan jumlah 101 faskes. Sementara ini sudah terdata 964 akseptor yang akan dilayani.

"Satu yang membahagiakan saya, ada akseptor pria. Untuk akseptor pria ini kadang-kadang mereka masih takut, untuk itu perlu ada penjelasan yang benar," ungkap Bupati.

Hadir pada kesempatan ini, dr. Dede Lina, M.KM Kepala DP-PKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah, Fajar Supriadi Sentosa, SH Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, juga hadir Forkopimcam Simpang Katis dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kabupaten Bangka Tengah. Tampak masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Perempuan Harus Punya Daya Saing!



Sedikitnya terdapat tiga Variabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sejumlah variabel pembentuk IDG tersebut di antaranya, angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan terakhir sumbangan pendapatan perempuan.

"Perempuan harus punya daya saing, untuk itu perempuan harus mampu berbicara di depan umum," kata Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Kegiatan Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Kabupaten Bangka, Selasa (13/6/2023).

Kegiatan yang digelar di ruang operasional, Kantor Bupati Bangka tersebut dimotori Koalisi Perempuan Indonesia. Tujuannya agar perempuan mampu mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri, berperan dan berpartisipasi aktif dalam mencegah masalah dan membangun kemampuan serta memiliki konsep diri.

Lebih jauh Asyraf menjelaskan, angka partisipasi perempuan di parlemen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah. Saat pemilu 2019 lalu, keterwakilan perempuan hanya dua orang saja. Seiring perjalanan, kemudian ada pergantian

antar waktu membuat keterwakilan perempuan menjadi empat orang.

Sementara untuk di DPRD Kabupaten Bangka, jelas Asyraf, saat pemilu 2019 lalu keterwakilan perempuan ada enam orang. Selanjutnya ada pergantian antar waktu, keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Bangka tinggal lima orang.

Menurut Asyraf, sangat penting partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan. Pasalnya jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Bangka Belitung berimbang. Selain itu, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan termasuk politik.

"Partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan bisa melakukan penghapusan segala diskriminasi. Untuk itu perlu adanya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan perempuan hingga di perdesaan," ungkapnya.

Menyinggung mengenai upaya peningkatan kapasitas politik perempuan, Asyraf mengatakan, harus ada langkah-langkah meningkatkan kualitas, kemampuan dan integritas diri perempuan. Tak hanya itu, sebab sangat penting menumbuhkan karisma dan image positif.

"Perempuan harus secara terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Agar mampu bersaing, perempuan mesti mempunyai visi dan misi," kata Asyraf.

Hal senada disampaikan Tati Raeningsih, SH Sekretaris Dinas P2KBP3A Kabupaten Bangka. Jika keterwakilan perempuan di parlemen banyak, maka aspirasi perempuan bisa diakomodir secara baik. Anggota parlemen di Kabupaten Bangka ada 35 orang.

"Hendaknya ke depan keterwakilan perempuan menjadi lebih banyak, minimal ada sepuluh anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Bangka," harapnya.

Workshop Service Excellent Dukcapil, Asyraf Ingin Ada Komitmen Mempermudah Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik harus bermuara pada peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat. Pasalnya, masyarakat adalah penerima langsung dari kebijakan-kebijakan pemerintah.



Demikian disampaikan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Workshop Service Excellent Dukcapil, di Novilla Boutique Hotel, Sungailiat, Senin (12/6/2023).

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil terus dikerjakan dan diperbaiki secara maksimal. Asyraf menambahkan, perbaiki tersebut agar layanan dapat menjadi lebih mudah, akurat dan lebih cepat selesai.

Asyraf menyarankan agar Disdukcapil juga membuka ruang dialog dengan dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan tentang layanan dukcapil.

“Jajaran Dukcapil harus memiliki komitmen untuk mendukung kemudahan pelayanan publik. Setiap

aparatur Dukcapil dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan menunjukkan kinerja performa terbaik,” sarannya.

Kegiatan Workshop Service Excellent ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membahagiankan. Kegiatan ini diikuti petugas Front Office (FO) Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Bangka Belitung.

Selain Kepala Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak sebagai narasumber yakni, Tim Training FO dari BRI Cabang Pangkalpinang.

Lebih jauh Asyraf menyarankan agar aparatur bisa membangun tim kerja yang efektif. Membuat rencana jelas, memahami tujuan, membangun lingkungan

nyaman dan kondusif serta membangun komunikasi terbuka dan saling percaya. “Aparatur harus memiliki sikap untuk mematuhi aturan dan berkomitmen pada kesepakatan. Selanjutnya, terus melakukan evaluasi kinerja tim dan jadilah orang yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan,” jelasnya.

Sementara Chyndi Fransiska dari Tim BRI mengatakan, pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan atau instansi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam maupun di luar perusahaan atau instansi.

“Pelayanan prima, pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan. Sebab masyarakat ingin dilayani dengan cepat, tepat, akurat, murah, mudah, dan ramah,” ungkapnya.



KECANDUAN SMARTPHONE BISA MEMBERI PENGARUH KURANG BAIK BAGI ANAK



DR. ASYRAF SURYADIN, M.PD KEPALA DP3ACSKB PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENINGATKAN AGAR ANAK-ANAK JANGAN MEMBIASAKAN DIRI MENGGUNAKAN SMARTPHONE. SEBAB SMARTPHONE DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK KURANG BAIK, TERUTAMA BAIK ANAK KECIL.

“Anak kecil jangan dibiasakan menggunakan smartphone,” tegas Asyraf saat Kegiatan Kualitas Hidup Anak melalui Forum Anak Selawang Segantang (FAST), di Hotel Santika, Senin (12/6/2023). Hadir

pada kegiatan tersebut, dr. Dede Lina, M.KM Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah.

Salah satu dampak kurang baik smartphone bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yakni, dapat mengubah perilaku anak. Asyraf menjelaskan, anak-anak harus cerdas, namun tak kalah penting memiliki perilaku dan akhlak yang baik.

“Orang tua di negara maju seperti Jepang, Australia tidak terlalu khawatir jika anaknya tidak paham matematika. Sebaliknya, mereka akan khawatir jika anaknya tidak bisa mengantre. Artinya, perilaku baik menjadi perhatian orang tua di negara maju,” pesan Asyraf.

Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Asyraf menjelaskan, ini menjadi bagian dari prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA). Selain itu, menghilangkan diskriminasi dan memberikan kepentingan terbaik bagi anak.

“Anak mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang. Memberi-

kan penghargaan terhadap pandangan anak juga menjadi komitmen pemerintah,” kata Asyraf.

Menyinggung mengenai forum anak, Asyraf mengatakan, partisipasi forum anak dalam pembangunan penting. Forum anak diharapkan bisa menyuarakan aspirasinya saat perencanaan pembangunan. Pemerintah diharapkan selalu melibatkan forum anak saat musrenbang di setiap tingkatan.

Menurut Asyraf, anak lebih baik banyak membaca daripada menggunakan smartphone. Selain mengisi aktivitas membaca buku, anak-anak bisa mengisi waktu membuat karya sastra seperti puisi. Kemudian hasil karya sastra tersebut bisa diikuti sertakan dalam lomba.

“Forum anak menjadi wadah aspirasi bagi anak. Forum anak hendaknya dibentuk hingga tingkat desa. Setelah dibentuk kapasitas anak harus ditingkatkan sebagai pelopor dan pelapor,” kata Asyraf.

Saat sesi diskusi, anak-anak peserta kegiatan tampak antusias bertanya. Lailatul Fitri siswa SMA 1 Kabupaten Bangka Tengah mempertanyakan langkah dan upaya pemerintah menurunkan angka pernikahan usia anak.

Menjawab pertanyaan tersebut, Asyraf menjelaskan, pemerintah melalui DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat poster serta media sosialisasi lainnya. Selain itu, memberikan edukasi langsung agar anak melakukan tindakan positif.

“Ada peraturan desa seperti di daerah Payung, jika terjadi pernikahan usia anak maka tidak boleh menggunakan fasilitas desa. Namun bagi yang terlanjur melakukan pernikahan usai anak, tetap didorong agar meneruskan sekolah,” ungkapnya.





Pendaftaran Penduduk Non Permanen Bisa Minta Bantuan Camat



Jumlah penduduk non permanen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan. Untuk itu, pendaftaran penduduk non permanen tersebut harus dilakukan secara terus menerus, sehingga bisa mewujudkan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Non Permanen, di Sun Hotel, Selasa (6/6/2023). Kegiatan ini dihadiri Kepala Disdukcapil dan camat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kita baru kali ini mengundang camat, diharapkan dengan kehadiran camat kali ini bisa mempercepat pendaftaran penduduk non permanen tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan pelayanan Adminduk dilakukan di kecamatan-kecamatan,” kata Asyraf.


Menurut Asyraf, salah satu kantor yang banyak penduduk non permanen yaitu instansi vertikal. Terdapat lima manfaat pendaftaran penduduk non permanen di antaranya, pertama untuk pelayanan publik, kedua bermanfaat bagi perencanaan pembangunan.

“Adapun manfaat ketiga guna pengalokasian anggaran, keempat untuk pembangunan demokrasi. Sedangkan manfaat kelima yakni, bermanfaat bagi penegakan hukum serta pencegahan,” paparnya.

Data sementara, kata Asyraf, jumlah penduduk non permanen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 927 orang. Penduduk ini tersebar di Kabupaten Bangka tiga orang, Bangka Selatan 62 orang, Bangka Tengah 93 orang dan Kabupaten Bangka Barat terdapat 56 orang.

“Sedangkan di Kabupaten Belitung Timur ada 226 orang





dan Pangkalpinang terdapat 487 orang. Adapun di Kabupaten Belitung belum ada penduduk non permanen yang terdaftar. Apakah mungkin di Kabupaten Belitung tidak ada penduduk non permanen?” tanya Asyraf.

Camat bisa membuat inovasi-inovasi bekerja sama dengan pihak Disdukcapil setempat. Asyraf mencontohkan, camat dapat membantu memberikan pelayanan cepat dalam penerbitan akte kematian.

“Camat dibantu pihak keluarga melakukan pendataan warga yang meninggal dunia, kemudian menginformasikan kepada Disdukcapil setempat. Selanjutnya Disdukcapil menerbitkan akta kematian tersebut,” jelas Asyraf.

Sementara saat sesi tanya jawab, Ramzi salah satu peserta kegiatan mengatakan mengenai sulitnya mendata penambang yang merupakan penduduk non permanen. Ia ingin mendapatkan solusi agar masyarakat tertib administrasi kependudukan.

Menjawab pertanyaan ini, Asyraf menegaskan pentingnya sosialisasi. Adanya sosialisasi membuat masyarakat mengerti pentingnya Adminduk. “Ini dikarenakan budaya kurang tertib. Kita harus menumbuhkan budaya tertib di masyarakat,” saran Asyraf.

Audiensi Bersama Warek III Unaba, Asyraf Siap Bersinergi



Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap bersinergi dengan Universitas Anak Bangsa (Unaba). Langkah awal sinergi tersebut yakni, melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi mahasiswa Universitas Anak Bangsa.





“Jika ingin melakukan aktivasi IKD bisa difasilitasi. Kita akan koordinasi dengan pihak Dukcapil kota agar mengirimkan tim. Adanya IKD, administrasi kependudukan dapat diakses menggunakan smart-phone,” kata Asyraf saat pertemuan di ruang kerjanya, Senin (5/6/2023).

Menurut Asyraf, IKD ini penting. Sebab sekarang ini lebih baik ketinggalan KTP-el dari pada ketinggalan smartphone. Jika sudah aktivasi IKD, maka tidak khawatir lagi ketinggalan KTP-el, sebab identitas kependudukan ada di smartphone.

Selain program Adminduk, jelas Asyraf, ada program pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Tak hanya itu, sebab bisa juga kerja sama untuk mahasiswa yang ingin magang.

“Untuk pengabdian masyarakat, kita bisa menjadi narasumber. Terutama mengenai program yang menjadi kewenangan dinas kita. Ada baiknya nanti membuat MoU dengan Pemprov, selanjutnya tinggal melakukan PKS ke dinas kita,” jelas Asyraf.

Sementara Warek III Universitas Anak Bangsa Taufik. K ingin menginformasikan program pendidikan di Unaba. Sehingga bisa bersinergi dengan program DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Stikes Abdi Nusa sekarang ini sudah menjadi Universitas Anak Bangsa. Kita ingin memperkenalkan mengenai universitas ini. Siapa tahu ada pegawai ingin melanjutkan kuliah di Unaba,” ungkapnya.

